

DAMPAK KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN: NYAWA MENJADI TARUHAN

Luthfyyah Kaysharani
luthfyyahkaysharani@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan global yang dapat terjadi di berbagai sektor pemerintahan, termasuk sektor kesehatan. Dalam konteks sistem kesehatan, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan anggaran kesehatan, manipulasi dalam proses pengadaan obat dan alat kesehatan, praktik suap dalam pelayanan medis, hingga pungutan liar kepada pasien. Praktik-praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat (Glynn, 2022).

Sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia. Oleh karena itu, integritas dan transparansi dalam pengelolaan sektor ini menjadi hal yang sangat krusial. Ketika praktik korupsi terjadi dalam sistem kesehatan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek administratif atau keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan medis. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi dalam sistem kesehatan berkorelasi dengan rendahnya kualitas layanan kesehatan, meningkatnya angka kematian bayi, serta menurunnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang layak (Factor & Kang, 2015).

Selain itu, korupsi juga dapat menghambat efektivitas berbagai program kesehatan masyarakat yang dirancang oleh pemerintah. Program-program seperti imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular menjadi tidak optimal ketika dana atau sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara transparan dan bertanggung jawab (Naher et al., 2020). Oleh karena itu, pembahasan mengenai dampak korupsi di sektor kesehatan menjadi sangat penting, karena isu ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan merata.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Korupsi di sektor kesehatan merupakan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat karena dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran kesehatan, menurunkan kualitas pelayanan medis, serta memperburuk akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang layak. Akibatnya, praktik korupsi dalam sistem kesehatan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik guna melindungi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Korupsi Menurunkan Kualitas Layanan Kesehatan

Korupsi dalam sektor kesehatan dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan sering kali disalahgunakan

atau tidak dikelola secara efektif. Lewis (2006) menjelaskan bahwa praktik korupsi dalam sistem kesehatan sering terjadi pada proses pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, maupun pembangunan fasilitas medis. Ketika proses pengadaan tidak dilakukan secara transparan, institusi kesehatan berisiko menerima produk dengan kualitas rendah atau harga yang tidak sesuai.

Selain itu, praktik korupsi juga dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelatihan tenaga medis atau peningkatan fasilitas rumah sakit dapat berkurang akibat penyalahgunaan dana. Naher et al. (2020) menyatakan bahwa korupsi dalam layanan kesehatan publik dapat menyebabkan terganggunya sistem pelayanan kesehatan di tingkat lapangan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi tidak optimal.

Akibatnya, pasien tidak mendapatkan pelayanan medis yang sesuai dengan standar kesehatan yang seharusnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi penyakit, memperpanjang proses penyembuhan, bahkan meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian yang sebenarnya dapat dicegah.

3.2. Korupsi Berkorelasi dengan Tingginya Angka Kematian

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi berkaitan erat dengan buruknya indikator kesehatan masyarakat. Factor dan Kang (2015) menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki angka kematian bayi yang lebih tinggi serta tingkat harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan negara dengan sistem pemerintahan yang lebih transparan.

Penelitian lain oleh Hanf et al. (2011) menunjukkan bahwa korupsi dapat berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian anak di berbagai negara. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa praktik korupsi mengurangi efektivitas berbagai program kesehatan masyarakat, seperti program imunisasi, pengobatan malaria, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ketika program-program tersebut tidak berjalan secara optimal, kelompok masyarakat yang paling rentan seperti anak-anak dan ibu hamil menjadi lebih berisiko mengalami masalah kesehatan yang serius.

Selain itu, Holmberg dan Rothstein (2011) juga menekankan bahwa korupsi dalam sistem kesehatan dapat secara tidak langsung menyebabkan kematian melalui berbagai mekanisme, seperti keterbatasan akses terhadap obat-obatan, rendahnya kualitas pelayanan medis, serta distribusi sumber daya kesehatan yang tidak merata.

3.3. Korupsi Menghambat Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan

Korupsi juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan. Praktik suap atau pungutan liar sering kali membuat masyarakat harus membayar biaya tambahan yang seharusnya tidak diperlukan untuk memperoleh layanan medis. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan dalam membayar biaya kesehatan.

Penelitian oleh Hsiao et al. (2019) menunjukkan bahwa praktik suap dalam sistem pelayanan kesehatan di beberapa negara berkembang meningkatkan kesulitan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Ketika pasien diharuskan memberikan pembayaran tidak resmi untuk mendapatkan pelayanan, sebagian masyarakat memilih untuk menunda pengobatan atau bahkan tidak mencari perawatan medis sama sekali.

Selain itu, Mostert et al. (2015) menunjukkan bahwa korupsi dalam sistem kesehatan juga berdampak pada penanganan penyakit serius seperti kanker. Dalam beberapa kasus, pasien tidak mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat waktu karena adanya praktik korupsi dalam distribusi obat dan layanan kesehatan. Hal ini dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko kematian.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Dampak korupsi di sektor kesehatan memiliki implikasi yang sangat luas bagi masyarakat maupun bagi sistem kebijakan publik. Bagi masyarakat, korupsi menyebabkan menurunnya kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap institusi kesehatan. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem kesehatan tidak transparan atau tidak adil, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan tenaga kesehatan juga dapat menurun (Naher et al., 2020).

Selain itu, korupsi juga memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena mereka lebih bergantung pada layanan kesehatan publik yang rentan terhadap praktik korupsi. Kondisi ini memperkuat kesenjangan sosial dalam bidang kesehatan dan berdampak pada ketidakmerataan hasil kesehatan antar kelompok masyarakat (Hsiao et al., 2019; Socoliuc et al., 2022).

Dari perspektif kebijakan publik, korupsi menghambat efektivitas berbagai program kesehatan yang telah dirancang oleh pemerintah. Anggaran kesehatan yang besar tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(Factor & Kang, 2015).

Selain itu, penerapan teknologi digital dalam sistem administrasi kesehatan, transparansi dalam pengadaan obat dan alat kesehatan, serta peningkatan integritas tenaga kesehatan dapat menjadi langkah penting dalam meminimalkan praktik korupsi di sektor kesehatan.

5. PENUTUP

Korupsi di sektor kesehatan merupakan masalah serius yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan kesehatan, menghambat akses masyarakat terhadap fasilitas medis, serta meningkatkan angka kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan tingginya tingkat korupsi berkorelasi dengan buruknya indikator kesehatan masyarakat serta meningkatnya risiko kematian, terutama pada kelompok rentan (Hanf et al., 2011; Holmberg & Rothstein, 2011).

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di sektor kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, reformasi sistem kesehatan yang berorientasi pada akuntabilitas dan keadilan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dengan sistem kesehatan yang bersih dari korupsi, pelayanan kesehatan dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu melindungi kehidupan masyarakat secara optimal (Socoliuc et al., 2022; Naher et al., 2020).

REFERENSI

- Factor, R., & Kang, M. (2015). Corruption and population health outcomes: an analysis of data from 133 countries using structural equation modeling. *International Journal of Public Health*.
- Hanf, M., Van-Melle, A., Fraisse, F., Roger, A., & Carne, B. (2011). Corruption kills: estimating the global impact of corruption on child deaths. *PLOS ONE*.
- Hsiao, A., Vogt, V., & Quentin, W. (2019). Effect of corruption on perceived difficulties in healthcare access in sub-Saharan Africa. *PLOS ONE*.
- Lewis, M. (2006). Governance and corruption in public health care systems. *Center for Global Development Working Paper*.
- Mostert, S., Njuguna, F., Olbara, G., Sindano, S., & Sitaresmi, M. (2015). Corruption in health-care systems and its effect on cancer care in Africa. *The Lancet Oncology*.
- Naher, N., Hoque, R., Hassan, M., & Balabanova, D. (2020). The influence of corruption and governance in the delivery of frontline health care services in the public sector. *BMC Public Health*.
- Holmberg, S., & Rothstein, B. (2011). Dying of corruption. *Health Economics, Policy and Law*. <https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law/article/dying-of-corruption>
- Socoliuc, O. R., Sîrghi, N., Jemna, D. V., & David, M. (2022). Corruption and population health in the European Union countries—An institutionalist perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.